

## APA YANG SALAH DENGAN DEMOKRASI?

Franz Magnis-Suseno

25 tahun sesudah Reformasi berhasil memasukkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia ke dalam Undang-undang Dasar kita, itu pun atas dasar Pancasila, timbul pertanyaan: Apa ada yang salah dengan demokrasi?

### Perjuangan Panjang

1945, dalam suasana persiapan Kemerdekaan, para *founding fathers* negara Indonesia sepakat: Indonesia harus menjadi negara modern, tak kalah modern dengan negara-negara termodern lain. Dan itu berarti: Indonesia harus menjadi sebuah demokrasi.

Akan tetapi, tentang apa itu demokrasi, dan model demokrasi apa yang cocok untuk Indonesia, para *founding fathers* tidak sependapat. Kebingungan itu sudah kelihatan dalam rumusan Pancasila. Dalam rumusan Bung Karno tang-

gal 1 Juni 1945 sila ketiga berbunyi: „Mufakat atau Demokrasi“, sedangkan dalam rumus definitif Pancasila tanggal 18 Agustus kata demokrasi hilang dan sila ke-empat menjadi „Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuyawaratan /perwakilan“. Kalau Hatta dan Muhammad Yamin mau memasukkan hak-hak asasi demokratis (“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan”) ke dalam Undang-undang Dasar, maka Sukarno menolaknya dengan argumen: „Kita rancang UUD dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu“. Akhirnya kebebasan demokratis hanya dikatakan "ditetapkan dalam undang-undang" (§ 28).

## **Kelahiran Demokrasi Modern**

Apa latar belakang kelahiran demokrasi? Saya mengabaikan demokrasi Yunani dan pemikiran Platon dan Aristoteles. Secara singkat, demokrasi lahir sebagai akibat pembongkaran feodalisme oleh pencerahan. Sejak abad ke-17 orang makin tidak percaya lagi bahwa para raja dan kaum bangsawan memiliki privilese mereka karena suatu penetapan Tuhan. John Locke menegaskan bahwa pemerintahan seorang raja harus atas dasar persetujuan rakyatnya, persetujuan mana harus dituangkan ke dalam suatu undang-undang dasar. Montesqieu menegaskan bahwa tiga kekuasaan politik: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif,

harus dipisahkan. Rousseau mencetuskan istilah yang akan menjadi inti tuntutan para demokrat: "Kedaulatan Rakyat". Atas nama kedaulatan rakyat Revolusi Prancis menyingkirkan monarki dan menggantikannya dengan republik.

Jadi dasar klaim demokrasi adalah suatu keyakinan etis amat fundamental. Yaitu bahwa setiap manusia, karena ia manusia, mempunyai hak dan martabat yang sama, bahwa setiap manusia lahir bebas dan karena itu segenap kekuasaan manusia atas manusia harus dilegitimasi oleh mereka yang dikuasai. Keyakinan-keyakinan ini dirincikan sebagai hak-hak asasi manusia.

Keyakinan dasar etis itu menjelma dalam dimensi politik dalam cita-cita demokrasi. Inti negara demokratis adalah adanya suatu undang-undang dasar yang menjamin kebebasan dan hak-hak asasi manusia segenap orang, kedudukan yang sama semua orang di hadapan undang-undang, hak partisipasi segenap orang dalam penetapan kebijakan negara dan peran negara sebagai penyelenggara kesejahteraan umum.

Cita-cita demokratis yang mulai menjadi realitas politik dalam Declaration of Independence of the United States of Amerika tahun 1776 dan dalam Revolusi Prancis 1789-95, semakin diyakini di Barat sejak abad ke-19 dan di abad ke-20. Dapat ditambah bahwa sukses demokrasi diperkuat oleh

kenyataan bahwa baru dalam demokrasi rakyat mencapai tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial, ekonomis dan kultural yang tinggi.

Perjalanan bangsa Indonesia ke demokrasi panjang. UUD tanggal 18 Agustus 1945 sangat lemah dari sudut jaminan demokratis. Namun sudah dalam Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta bulan Nopember 1945 PPKI dijadikan semacam parlemen. Undang-undang Dasar Sementara 1950 –yang, anehnya, sebagian besar ditulis oleh Supomo– amat sangat liberal, mirip dengan demokrasi Prancis dan di Italia, dan memuat hak-hak asasi manusia dari Universal Declaration of Human Rights 1948. Dengan akibat pemerintah – dipimpin oleh seorang perdana menteri – tidak stabil. 1955 pemilihan umum se-Indonesia berlangsung gemilang, tanpa ada kekerasan sama sekali. Konstituante yang juga dipilih berusaha untuk menyetujui Undang-undang Dasar baru. Sampai pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno, melalui sebuah Dekrit, membubarkan Konstituante, menetapkan Indonesia kembali ke UUD 1945 dan membentuk MPRS. Mulailah "demokrasi terpimpin" yang berakhir dalam malapetaka 1965-66 dan dalam "Demokrasi Pancasila" Orde Baru. Baru dalam reformasi –hasil keberanian para mahasiswa untuk berdemonstrasi menolak perpanjangan resim Orde Baru– demokrasi lahir betul di Indonesia. Presiden Habibie berjasa besar. Ia melepaskan para tahanan politik,

memberi kebebasan berpendapat dan berkumpul, memungkinkan pemilihan umum 1999 di luar waktu, dan memungkinkan Timor Leste memperoleh kemerdekaan. MRP terpilih baru memasukkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar negara kita.

## **Demokrasi: Sebuah Succes Story**

Dukungan terhadap demokrasi tidak mengherankan. Meskipun abad ke-20 penuh perang dan konflik, namun ternyata tak ada kasus satu pun adanya perang antara dua negara yang demokratis. Negara-negara demokratis juga mencapai perdamaian internal luar biasa. Dan tak ada negara demokratis yang pernah mengalami hama kelaparan.

Ada lima unsur hakiki dalam demokrasi: Prinsip perwakilan, pemilihan umum: *one person one vote*, prinsip mayoritas, oposisi, dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Beberapa catatan:

*Prinsip Perwakilan:* Karena tidak mungkin sekian juta warga negara bermusyawarah bersama, para warga memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan di mana setiap warga negara secara bebas memilih wakilnya. Nah, di sini yang penting adalah *partai politik*. Para pemilih umumnya tidak mengenal para calon. Apa yang akan mereka perjuangkan diketahui dari partai politik mereka masing-masing. Orien-

tasi perpolitikan partai politik dari ideologi yang merupakan identitasnya diketahui: Ada yang konservatif, ada yang sosialis, ada yang liberal, ada yang agamis, ada yang hijau, dst. Di Amerika Serikat ada Partai Republik yang agak kanan, dan Partai Demokrat yang agak kiri. Dengan memilih wakil dari partai politik tertentu pemilih dapat menentukan arah perpolitikan negara.

*Pemilihan Umum, one person one vote.* Dengan demikian "rakyat", semua warga negara (yang mencapai umur yang ditetapkan) betul-betul terlibat dalam perpolitikan negara mereka. Argumen bahwa *one person one vote* berarti bahwa orang yang bodoh sama kedudukannya dengan mereka yang pintar adalah tanda arogansi yang memalukan. Orang kecil pun tahu apa yang dia harapkan, dan partai-partai politik memang menjelaskan posisi mereka masing-masing dengan cara yang dapat dimengerti juga oleh orang kecil. Maka suara orang kecil sama nilainya dengan suara "orang pintar". Pemilu-pemilu bebas yang sudah dilangsungkan di Indonesia: 1955, lalu 1999 dan seterusnya, menunjukkan bahwa rakyat tahu apa yang mereka kehendaki.

*Prinsip mayoritas.* Prinsip itu berarti: Keputusan dalam DPR diambil oleh mayoritas, tidak perlu kesepakatan. Prinsip itu sering ditolak dengan argumen bahwa yang khas bagi Indonesia adalah musyawarah dan mufakat. Argumen ini

bodoh. Jelas sekali, musyawarah yang melibatkan 200 juta orang Indonesia adalah kemustahilan. Justru akan diambil alih oleh elit-elit yang mengatasnamakan "rakyat". Karena itu, tadi, *one person one vote* begitu penting. Rakyat memilih calon dari salah satu partai politik, yaitu yang orientasi politiknya sesuai dengan harapan pemilih. Nah, semua masalah politik, semua hal yang perlu diputuskan oleh pemerintah –entah di bidang keamanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, luar negeri dan lain-lain– ada segi-segi positif dan segi-segi negatifnya. Agar keputusan yang diambil secara optimal, bukan hanya segi-segi positif, melainkan juga segi-segi negatif perlu diberi perhatian. Misalnya dalam hal MBG. Sesudah dibicarakan secara mendalam, perlu diputuskan: Misalnya: MBG mau diadakan atau tidak. Kalau suatu mayoritas berpendapat, MBG, meskipun ada risikonya, diadakan, itulah yang menjadi keputusan. Keputusan itu akan baik karena diambil sesudah semua segi penting, termasuk segi-segi yang negatif, dibicarakan, ditanggapi dan diperhatikan. Apalagi: Debat di Dewan Perwakilan Rakyat tidak terjadi di ruang kosong, melainkan disertai oleh debat dalam *civil society*: Media, LSM, kelompok dan asosiasi, misalnya konperensi rektor, serikat buruh, think tanks dll. Civil society itu memperhatikan, memperdebatkan, menilai, mengkritik, mengusulkan alternatif terhadap kebijakan politik yang harus diambil oleh pemerintah. Dengan demikian ter-

jamin bahwa segi-segi penting suatu masalah semua diperhatikan. Maka kalau akhirnya keputusan diambil oleh suatu mayoritas, misalnya oleh partai-partai yang mendukung pemerintah, dapat diandaikan bahwa semua segi penting diperhatikan.

*Oposisi:* Dengan oposisi dimaksud bahwa dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada partai-partai yang tidak mendukung pembentukan pemerintah dan tidak mempunyai wakil-wakil di antara para menteri. Oposisi sering ditolak dengan argumen, kita selalu mencari mupakat. Argumen itu lemah. Apabila semua partai mendukung pemerintah –pemerintahan atap lebar– pemerintah memang dapat melaksanakan semua rencana dengan gampang dan cepat, akan tetapi tidak terjamin bahwa masalah dipelajari sungguh-sungguh. Oposisi berfungsi menuntut perhatian pada segi-segi negatif. Oposisi itu justru sangat penting karena memaksa pemerintah untuk memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan suatu rencana, misalnya, lagi-lagi, MBG. Adanya oposisi dengan demikian memastikan bahwa apa yang akhirnya diputuskan, adalah hasil pertimbangan yang matang. Adanya oposisi sebagai sosok resmi memungkinkan sesuatu yang amat penting: Bahwa perbedaan pendapat, kritik, pengajuan tuntutan tajam bisa terlaksana tanpa permusuhan. Debat antara partai-partai pemerintah dan partai-partai oposisi bisa berlangsung secara tajam, tetapi

tidak emosional. Habis berdebat wakil rakyat pro-pemerintah dan oposisi ngopi bersama.

*Hak-hak asasi manusia:* Keberhasilan demokrasi mengandaikan hormat terhadap hak-hak asasi manusia. Mengapa? Hormat terhadap hak asasi manusia menjamin bahwa suatu mayoritas tidak dapat memperkosa hal-hal yang betul-betul asasi bagi setiap warga. Kesediaan untuk menerima suatu pemerintahan tergantung dari apakah masyarakat, setiap anggota, bisa terjamin bahwa hak-hak asasi manusianya tidak disentuh, jadi bahwa prinsip mayoritas tidak menyangkut segi-segi kemanusiaan yang hakiki.

Di sini tempatnya untuk dua catatan. Yang pertama: Terhadap demokrasi-*one-person-one-vote* sering, sejak Supomo, diajukan bahwa itu liberalisme. Kekhawatiran itu warisan dari fasisme dan Marxisme-komunisme. Para pemimpin fasis dan komunis khawatir terhadap apa yang mengancam kekuasaan hidup-mati di tangan mereka. Justru berhadapan dengan komunisme dan fasisme menjadi jelas betapa penting bahwa kebebasan termasuk hak-hak asasi manusia yang dideklarasikan dalam Universal Declaration of Human Rights. Tetapi memang betul –dan, misalnya, dalam ajaran sosial Gereja Katolik sejak Paus Leo XIII (1891) selalu ditekankan: Kalau yang dijamin hanyalah kebebasan, maka akan terciptakan ketidakadilan. Karena itu pewujudan kesejahteraan

raan umum dan keadilan sosial pun dipermaklumkan dalam masuk ke dalam Universal Declaration of Human Rights.

Yang kedua. Prinsip *one-person-one-vote* di Indonesia, lihat Supomo, sering dihubungkan dengan individualisme. Wat en onzin! Individualisme memang cacad karena merupakan perhatian eksklusif terhadap kepentingannya sendiri. Individualisme ad di segala jaman. Yang khas bagi modernitas adalah individualisasi. Yaitu bahwa orang semakin tidak dapat mengandalkan komunitasnya dalam menjamin hidupnya. Indonesia pun sudah lama terkena individualisasi. Kecuali di beberapa desa, di Indonesia pun setiap orang dewasa hanya bisa hidup wajar kalau ia secara pribadi mempunyai tempat kerja. Tanpa KTP polisi tidak percaya bahwa saya ada meskipun saya berdiri di depannya. Tanpa uang di saku saya bisa mati kelaparan di tengah kelimpahan makanan. Di sekolah, kalau saya sebagai murid pinter dalam ujian membantu rekan murid yang kurang pinter, saya tidak dipuji karena saya bersikap sosial, melainkan kami dua-duanya malah akan dihukum.

## **Apa Yang Salah Dengan Demokrasi Indonesia?**

Teman-teman: 28 Tahun lalu para mahasiswa kita berhasil mengakhiri 32 tahun pemerintahan Orde Baru dan membawa Reformasi. Sahabat saya, Prof. B. J. Habibie, me-

lepaskan para tahanan politik, memberi kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berorganisasi, memungkinkan pemilihan umum di luar waktu 1999 dan memungkinkan Timor Leste mendapat kemerdekaannya. Reformasi berhasil. Berhasil memasukkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia ke dalam UUD kita, itu pun atas dasar Pancasila.

Sekarang kita bertanya: Apa reformasi betul-betul berhasil? Yang tidak berhasil dilaksanakan adalah tuntutan mahasiswa: Brantas KKN, brantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Jaringan-jaringan korup sepertinya hanya mundur ke belakang untuk sementara. Kita mempunyai pemilihan umum yang bebas, bahkan kebebasan membentuk partai politik. Tetapi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan terpilih oleh rakyat tidak menyuarakan rakyat. Kok dalam kerusuhan Agustus 2025 tak ada suara dari DPR kedengaran. Kalau untuk menjadi rakyat harus membayar sampai 10 milyar Rupiah –bayangkan– ya jelas, yang terpilih hanya orang super-kaya atau orang yang –lebih gawat lagi – disponsori oleh orang superkaya. Kalau kita bertanya: para petani kecil, buruh kecil, nelayan kecil, mereka yang hidup dari berjualan di pinggir jalan di Jakarta atau Surabaya, harus memilih partai mana, tak ada jawaban. Tak ada partai kiri dalam DPR. Korupsi merajalela. Kita mempunyai Menteri Kebudayaan yang mau menulis kembali sejarah bangsa dengan menyingkirkan adanya kurban. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada

sesuatu yang busuk dalam sistem kita. Dan kebusukan bukan kebusukan rakyat. Apabila 50 persen rakyat Indonesia yang belum betul-betul sejahtera mendapat kesan bahwa Indonesia adalah "milik mereka yang di atas" kita jangan heran kalau mereka mencari ideologi lain. 80 tahun Pancasila dan kami tetap belum sejahtera?

Teman-teman: Yang salah bukan demokrasi. Yang salah adalah mereka yang memakai demokrasi untuk keuntungan mereka sendiri, yang tidak mengizinkan rakyat betul-betul dapat berkuasa. Indonesia belum gagal, akan tetapi kalau kita mau mencapai tahun emas 2045 dalam keadaan yang membanggakan, perlu ada perubahan.

